

### **BAB III**

## **GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN KERANGKA PENDANAAN**

Keuangan daerah merupakan komponen paling penting dalam perencanaan pembangunan, sehingga analisis mengenai kondisi dan proyeksi keuangan daerah perlu dilakukan untuk memperoleh proyeksi yang tepat mengenai kemampuan daerah dalam mendanai rencana pembangunan dan pemecahan permasalahan strategis secara tepat. Dengan melakukan analisis keuangan daerah yang tepat akan melahirkan kebijakan yang efektif dalam pengelolaan keuangan daerah.

Pengelolaan keuangan daerah Kota Bogor dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah.

Struktur APBD Kota Bogor terdiri dari:

1. Penerimaan Daerah yang di dalamnya terdapat Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.
2. Pengeluaran Daerah yang di dalamnya terdapat Belanja Daerah serta Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

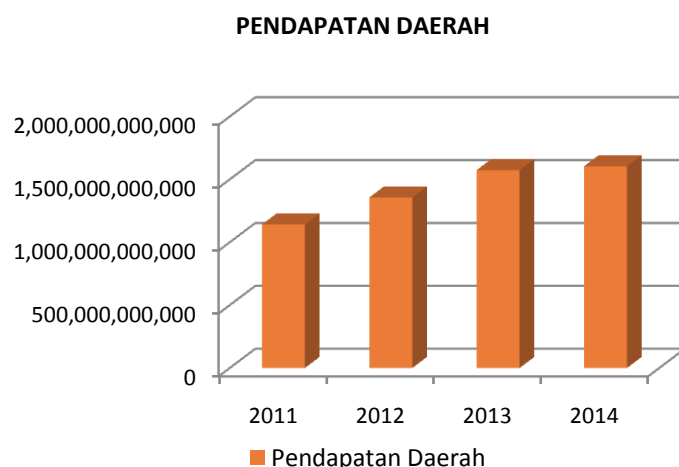
### **III.1. KINERJA KEUANGAN MASA LALU**

Kinerja keuangan masa lalu menguraikan tentang kinerja pelaksanaan APBD. Kinerja pelaksanaan APBD diketahui dari kinerja pendapatan daerah dan kinerja belanja daerah.

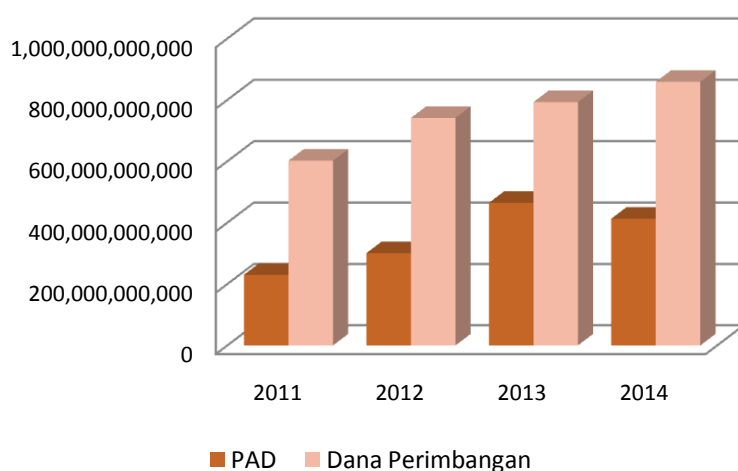
#### **III.1.1. PENDAPATAN DAERAH**

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah diperoleh melalui sumber-sumber meliputi: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Selama empat tahun terakhir (2011-2014), realisasi Pendapatan Daerah terus menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata peningkatan per tahun sebesar 12,28 persen yaitu dari Rp 1.141.638.163.971 pada tahun 2011 menjadi Rp 1.604.980.700.547 pada tahun 2014. Kenaikan pendapatan ini seiring dengan peningkatan pendapatan yang diperoleh dari pos Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan, sedangkan untuk pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah nilainya mengalami fluktuasi dalam empat tahun terakhir. Kenaikan pendapatan daerah ini memberikan gambaran pertumbuhan yang positif sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Gambar III.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014



Gambar III.2 Besaran Komponen Pembentuk Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014

### III.1.1.1. PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas: (a) Pajak Daerah, (b) Retribusi Daerah, (c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan (d) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

PAD selama kurun waktu 2011-2014 mengalami kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebesar 30,59 persen pada tahun 2012 kemudian meningkat lebih tinggi lagi yaitu sebesar 54,42 persen pada tahun 2013. Peningkatan PAD ini disebabkan oleh peningkatan yang cukup signifikan pada semua pos PAD. Pos yang mengalami peningkatan yang sangat signifikan adalah pos Pajak Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 26,36 persen setiap tahunnya atau meningkat dari Rp 165.396.746.064 pada tahun 2011 menjadi Rp 311.645.000.000 pada tahun 2014.

Dari Tabel III.1 komponen PAD yang memberikan kontribusi sangat besar adalah pos Pajak Daerah dengan kontribusi kepada PAD berkisar antara 71,77 persen sampai dengan 75,41 persen. Pos-pos lain yang memberikan kontribusi kepada PAD berturut-turut adalah pos Retribusi Daerah dengan kisaran persentase kontribusi 14,37 persen hingga 15,85 persen, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah berkontribusi terhadap PAD dengan kisaran antara 5,02 persen hingga 6,65 persen dan pos Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berkontribusi antara 4,21 persen sampai dengan 5,98 persen terhadap PAD.

Tabel III.1Penerimaan PAD Kota Bogor Tahun 2011-2014

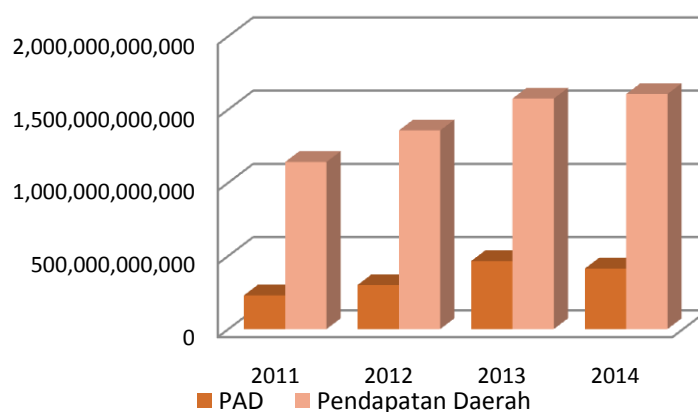
NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014*	RENTANG PERSENT ASE KONTRIB USI	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	Pajak Daerah	165.396.74 6.064	224.746.19 7.191	341.419.70 4.885	311.645.0 00.000	71,7 7	75,41 23,51%
2	Retribusi Daerah	35.950.601. 655	44.698.473 .424	73.636.737 .984	59.376.06 5.903	14,3 7	15,85 18,20%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	13.784.056. 944	15.180.503 .825	19.568.717 .822	21.473.57 2.209	4,21	5,98 15,92%
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	15.318.039. 957	16.307.295 .770	30.070.719 .794	20.754.57 4.582	5,02	6,65 10,65%
	Jumlah PAD	230.449.44 4.620	300.932.47 0.210	464.695.88 0.485	413.249.2 12.694	100	100 21,49%

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2013

\* Angka berdasarkan APBD Murni 2014

Selama tahun 2011-2014, PAD memiliki proporsi yang kecil terhadap Pendapatan Daerah bila dibandingkan dengan pos Dana Perimbangan. Rata-rata kontribusi PAD hanya sebesar 24,41 persen per tahun. Hal tersebut dapat diartikan bahwa ketergantungan pada Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi masih relatif tinggi.

Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah



Gambar III.3 Kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah Tahun 2011-2014

### III.1.1.2. DANA PERIMBANGAN

Dana Perimbangan merupakan pendapatan pemerintah daerah yang berasal dari pemerintah pusat. Berdasarkan data realisasi Dana Perimbangan dalam APBD Kota Bogor pada tahun 2011-2014, terlihat bahwa Dana Perimbangan terus mengalami peningkatan yang signifikan. Penerimaan Dana Perimbangan ini mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 12,80 persen per tahun.

Pada tahun 2011 penerimaan Dana Perimbangan Kota Bogor mencapai Rp 602.216.659.331 kemudian meningkat sebesar 23,15 persen pada tahun 2012 menjadi Rp 741.642.441.988. Nilai ini kemudian meningkat pada tahun 2013 hingga menjadi Rp 792.975.350.762 dan terus meningkat menjadi Rp 859.072.322.269 pada tahun 2014.

Kenaikan di tahun 2013 tidak sebesar kenaikan pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh menurunnya jumlah penerimaan dari Pos Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak dari Rp 113.540.376.988 pada tahun 2012 menjadi Rp

86.768.928.762 atau berkurang 35.01 persen. Pada tahun 2014 Pos Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak meningkat kembali sebesar 8,34 persen menjadi Rp 93.257.764.269.

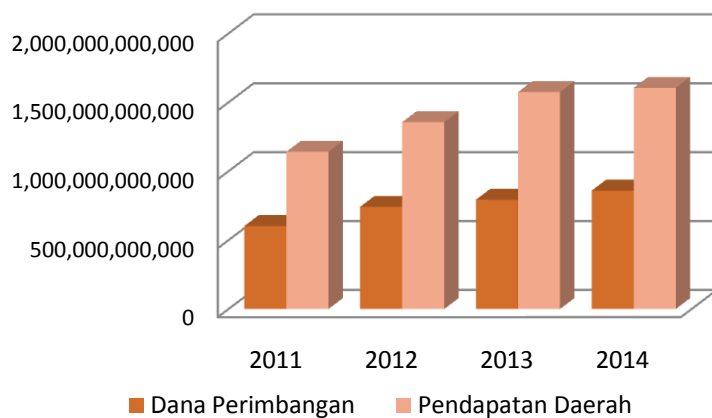
Pos-pos yang memberikan kontribusi kepada Dana Perimbangan terdiri dari: (1) Pos Dana Alokasi Umum (DAU). (2) Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak. dan (3) Dana Alokasi Khusus (DAK). sebagaimana tabel berikut.

Tabel III.2Komponen Realisasi Dana Perimbangan Kota Bogor Pada Pendapatan Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PROPORSI DANA PERIMBANGAN	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	Bagi Hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak	120.803.371.331	133.540.376.988	86.786.928.762	93.257.764.269	16,34	-5,67
2	Dana Alokasi Umum	472.888.338.000	603.531.550.000	686.520.759.000	732.337.058.000	82,16	16,02
3	Dana Alokasi Khusus	8.524.950.000	4.570.515.000	19.667.663.000	33.477.500.000	1,50	118,05
	JUMLAH DANA PERIMBANGAN	602.216.659.331	741.642.441.988	792.975.350.762	859.072.322.269	100,00	12,80

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

Dalam kurun waktu tahun 2011-2014. Dana Perimbangan memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah rata-rata sebesar 52,89 persen per tahun. Ini artinya penerimaan Dana Perimbangan merupakan kontribusi terbesar terhadap pembentukan Pendapatan Daerah. Perkembangan kontribusi Dana Perimbangan dapat dilihat pada Gambar III.4.



Gambar III.4 Kontribusi Realisasi Dana Perimbangan terhadap Realisasi Pendapatan Daerah Kota Bogor 2011-2014

### III.1.1.3. LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri atas: (a) Pendapatan Hibah, (b) Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, (c) Bantuan Keuangan dari Provinsi/ Pemerintah Daerah lainnya, (d) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dan (e) Dana Darurat.

Dalam rentang 2011-2014, pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami penerimaan secara fluktuatif. Pada tahun 2012, jumlah realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp 313.944.168.157, yang mana meningkat 1,61 persen dibandingkan dengan tahun 2011

sebesar Rp308.971.864.020. Kenaikan ini dipengaruhi oleh meningkatnya pos Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp16.217.471.822 dan peningkatan pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya sebesar Rp31.724.957.555. Akan tetapi, pada saat yang sama terjadi penurunan Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus sebesar Rp32.459.160.240.

Pada tahun 2013, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah hanya mengalami pertumbuhan sebesar 0,87 persen dari Rp313.955.168.157 pada tahun 2012 menjadi Rp 316.700.777.711. Perlambatan pertumbuhan ini disebabkan oleh adanya penurunan yang tajam pada pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya dari Rp 72.203.842.100 menjadi Rp 27.406.344.276.

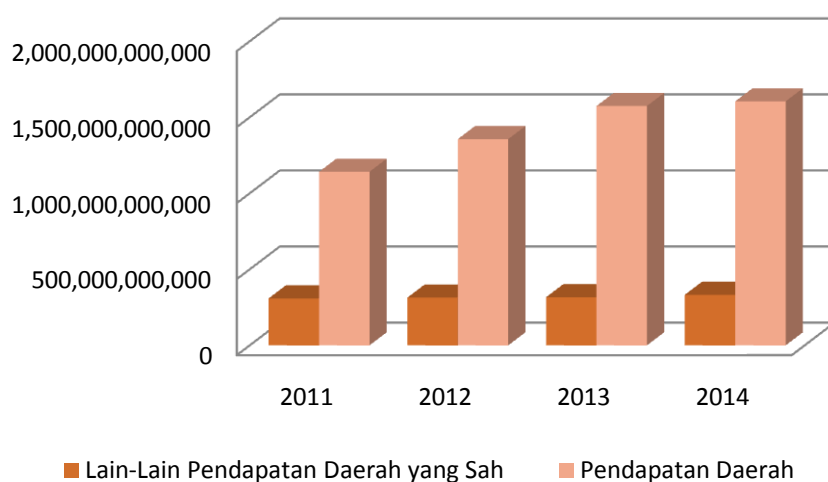
Pada tahun 2014, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan sebesar 5,04 persen dengan nilai penerimaan sebesar Rp 332.659.165.584. Peningkatan ini disebabkan oleh peningkatan pos Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya.

**Tabel III.3 Realisasi Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Kota Bogor Tahun 2011-2014**

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PROPORSI	RATA-RATA PERTUMBUHAN
1	Pendapatan Hibah	10.499.965.000	0	0	6.000.000.000	1,30	n.a
2	Bagi Hasil Pajak Provinsi	99.788.359.235	116.005.831.057	134.389.347.435	124.676.079.584	37,29	8,29
3	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	158.204.655.240	125.745.495.000	154.905.086.000	154.905.086.000	46,68	0,89
4	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah lainnya	40.478.884.545	72.203.842.100	27.406.344.276	47.078.000.000	14,73	29,37
	<b>Jumlah Lain-Lain Pendapatan yang Sah</b>	<b>308.971.864.020</b>	<b>313.955.168.157</b>	<b>316.700.777.711</b>	<b>332.659.165.584</b>	<b>100</b>	<b>2,51</b>

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

Memperhatikan data selama empat tahun kontribusi realisasi penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah dapat dilihat melalui grafik berikut.



**Gambar III.5 Kontribusi Realisasi Penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor**

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam kurun waktu tahun 2011-2013 memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Daerah rata-rata 25,39 persen per tahun. Kontribusi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan penyumbang terkecil terhadap Pendapatan Daerah Kota Bogor. Persentase kontribusi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terus mengalami penurunan dari 28,91 persen pada tahun 2011 menurun menjadi 26,20 persen pada tahun 2012 dan terus menurun menjadi 21,52 persen pada tahun 2013.

### III.1.2. BELANJA DAERAH

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana terakhir diubah dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Kewajiban pemerintah daerah tersebut adalah mendanai penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Belanja daerah yang direncanakan tersebut dikelompokkan menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL) dan Belanja Langsung (BL). Belanja Tidak Langsung merupakan kinerja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan, sedangkan Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Besaran Belanja Daerah Kota Bogor dalam kurun waktu 2011-2014 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2012 pertumbuhan realisasi Belanja Daerah sebesar 16,90 persen dari Rp 1.074.576.515.295 pada tahun 2011 menjadi Rp 1.256.206.808.990. Nilai ini kemudian meningkat menjadi 13,21 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 1.422.132.371.106 dan terus mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi Rp 1.746.486.907.247.

Peningkatan Belanja Daerah tersebut disumbang oleh kedua komponen Belanja Daerah yaitu Belanja Tidak Langsung yang rata-rata kenaikannya sebesar 8,25 persen per tahun dan Belanja Langsung sebesar 29,76 persen per tahun dalam kurun waktu 2011-2014.

Tabel III.4 Belanja Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Belanja Tidak Langsung	651.341.702.518	673.881.506.052	759.629.257.174	824.669.820.965
2	Belanja langsung	423.234.812.777	582.325.302.938	662.503.113.932	913.723.976.142
	TOTAL BELANJA	1.074.576.515.295	1.256.206.808.990	1.422.132.371.106	1.746.488.907.247

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2014

### III.1.2.1. BELANJA TIDAK LANGSUNG

Belanja Tidak Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bagi hasil, belanja bantuan dan belanja tidak terduga. Belanja tidak langsung pada dasarnya tidak berkaitan secara langsung dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan.

Selama periode 2011-2014 perkembangan Belanja Tidak Langsung Kota Bogor menunjukkan kecenderungan kenaikan sebesar 8,25 persen per tahun. Pada tahun 2011 realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 651.341.702.518 kemudian meningkat menjadi Rp 824.669.820.965 pada tahun 2014.

Tabel III.5 Belanja Tidak Langsung Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
5.1	Belanja Tidak Langsung	651.341.702.518	673.880.506.052	759.629.257.174	824.669.820.965
5.1.1	Belanja Pegawai ( Bel. Tidak Langsung )	541.591.289.786	629.017.584.082	666.001.628.574	746.344.698.204
5.1.2	Belanja Bunga	0	788.319.621	3.536.703.420	5.700.000.000
5.1.3	Belanja Subsidi	0	-	993.071.158	-
5.1.4	Belanja Hibah	30.001.151.750	34.721.274.400	2.392.000.000	38.257.312.000
5.1.5	Belanja Bantuan Sosial	77.973.952.452	3.899.753.000	21.675.545.000	21.680.229.000
5.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota	854.909.499	-	-	900.000.000
5.1.8	Belanja Tidak Terduga	1.775.308.530	4.598.665.450	3.592.797.109	11.787.581.761

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2012-2013

### III.1.2.2. BELANJA LANGSUNG

Belanja Langsung merupakan belanja yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan. Untuk mengukur capaian prestasi kerja dari belanja langsung dapat dilihat dari sejauh mana indikator kinerja daerah yang telah ditetapkan dapat dicapai. Belanja Langsung terdiri atas tiga komponen utama yang menjadi prioritas, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Selama periode 2011-2014, terdapat peningkatan Belanja Langsung Kota Bogor yang cukup signifikan dengan rata-rata peningkatan sebesar 29,76 persen. Pada tahun 2011, realisasi Belanja Langsung sebesar Rp 423.234.812.777 kemudian meningkat pada tahun 2012 sebesar 37,59 persen menjadi Rp 582.325.302.938. Pada tahun 2013 realisasi Belanja Langsung Rp 662.503.113.932 kemudian ditargetkan meningkat 39,14 persen menjadi Rp 872.754.981.682 pada tahun 2014.

Tabel III.6 Belanja Langsung

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
5.2	BELANJA LANGSUNG	423.234.81 2.777	582.325.30 2.938	662.503.11 3.932	872.754.98 1.682
5.2	Belanja Pegawai ( Bel.	67.535.066.	92.119.355.	88.649.061.	110.122.90
.1	Langsung )	055	958	925	8.298
5.2	Belanja Barang dan	222.746.78	267.929.90	349.545.99	286.129.73
.2	Jasa	8.684	9.220	2.987	0.056
5.2	Belanja Modal	132.952.95	222.276.03	224.308.05	476.502.34
.3		8.038	7.760	9.020	3.328

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2012-2014

### III.1.3. NERACA DAERAH

Neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Di sisi Neraca Daerah, total aset pemerintah Kota Bogor yang tercatat pada tahun 2013 sebesar Rp5.438.033.205.130,55. Aset yang paling besar peningkatannya adalah pada aset tanah yang mengalami peningkatan sebesar Rp250.572.365.606 atau mengalami peningkatan sebesar 9,52% disbanding tahun 2012.

Tabel III.7 Neraca Daerah Tahun 2012-2013

NO.	URAIAN	REF	TAHUN	
			2012 (RP)	2013 (RP)
<b>I</b>	<b>ASET</b>			
I.1	ASET LANCAR			
1	Kas di Kas Daerah	3.2.1	166.713.638.494,00	293.517.712.205,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	3.2.2	424.066.889,00	793.162.712,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	323	-	55.575.072,00
4	Piutang pajak daerah	324	771.905.446,00	188.453.383.305,00
5	Piutang Retribusi daerah	3.2.5	1.490.777.483,15	1.629.489.149,15
6	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Provinsi	3.2.6		18.721.968.738,00
7	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	327	3.040.095.084,00	2.724.308.866,00
8	Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan	328	33.762.181,00	33.762.181,00
9	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	3.2.9	195.538.500,00	192.338.500,00
10	Piutang Lainnya	3.2.10	48.474.718.865,34	152.385.530.380,25
11	Persediaan	3211	99.957.775.980,89	15.281.768.743,00
	Jumlah Aset Lancar		231.102.278.923,38	673.738.999.851,40
I.2	INVESTASI JANGKA PANJANG			
I.2.1	Investasi Non Permanen	3211		
1	Dana Bergulir	3211	63.742.100,00	63.742.100,00
	Jumlah Investasi Non-Permanen		63.742.100,00	63.742.100,00
I.2.2	Investasi Permanen	3.2.12		
1	Penyertaan Modal di PD BPR Bank Pasar	3.2.12	18.398.674.866,82	28.559.573.701,42
2	Penyertaan Modal di	3.2.12		11.684.452.323,00



NO.	URAIAN	REF	TAHUN	
			2012	2013
			(RP)	(RP)
	Bank Jabar Cabang Bogor		11.684.452.323,00	
3	Penyertaan Modal di PDAM Kota Bogor	3212	134.491.876.103,84	162.331.559.353,51
4	Penyertaan Modal di PD Jasa Transportasi	3212	10.720.874.621,91	96.669.314.655,91
5	Penyertaan Modal di PD Pasar Pakuan Jaya	3.2.12	107.939.876.005,45	114.873.747.559,31
	Jumlah Investasi Permanen	3.2.12	283.235.753.921,02	327.118.647.593,15
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		283.299.496.021,02	327.182.389.693,15
I.3	ASET TETAP			
1	Tanah	3213	2.380.146.197.497,00	2.630.718.563.103,00
2	Peralatan dan Mesin	3213	246.667.762.998,00	282.725.477.379,00
3	Gedung dan Bangunan	3.2.13	474.789.036.321,00	555.795.536.617,00
4	Jalan. Irigasi. dan Jaringan	3.2.13	721.405.361.294,00	808.548.272.711,00
5	Aset Tetap Lainnya	3213	10.359.929.882,00	10.971.683.772,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	3213	19.857.578.158,00	44.491.891.156,00
7	Akumulasi Penyusutan	3.2.13	-	-
	Jumlah Aset Tetap		3.853.225.866.150,00	4.293.251.424.738,00
I.4	DANA CADANGAN	3.2.14		
1	Dana Cadangan	3.2.14	25.000.000.000,00	-
	Jumlah Dana Cadangan		25.000.000.000,00	-
I.5	ASET LAINNYA	3215		
1	Tagihan Penjualan Angsuran	3.2.15	-	-
2	Tuntutan Perbendaharaan (TP)	3.2.15	-	-
3	Tuntutan Ganti Rugi (TGR)	3215	5.925.000,00	5.925.000,00
4	Kemitraan dengan Pihak Ketiga (BOT)	3215	70.583.504.310,00	127.940.052.768,00
5	Aset Tak Berwujud	3.2.15	4.366.021.300,00	6.091.310.880,00
6	Aset Rusak Berat	3.2.15	9.557.344.770,00	9.823.102.200,00
	Jumlah Aset Lainnya	3215	845.127.953.80,00	143.860.390.848,00
	JUMLAH ASET		4.477.140.436.474,40	5.438.033.205.130,55
<b>II</b>	<b>KEWAJIBAN</b>			
II.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	3.2.16		-
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	3.2.16	77.632.901,00	60.864.840,00
2	Utang Bunga	3216	-	-
3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	3216	-	-
4	Utang Jangka Pendek Lainnya	3.2.16	5.685.839.766,00	252.669.962,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Pendek	3.2.16	5.763.472.667,00	313.534.802,00
II.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	3.2.17		

NO.	URAIAN	REF	TAHUN	
			2012	2013
			(RP)	(RP)
1	Utang kepada Bank Jabar	3.2.17	-	-
2	Utang kepada Pemerintah Pusat	3217	3.585.182.807.800,00	6.421.300.000.000,00
	Jumlah Kewajiban Jangka Panjang	3217	35.851.828.078,00	64.212.950.948,00
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN</b>		<b>41.615.300.745,00</b>	<b>64.526.485.750,00</b>
<b>III</b>	<b>EKUITAS DANA</b>			
III	EKUITAS DANA			-
1	LANCAR	3218		
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	3218	16.706.000.548.100,00	29.424.600.000.000,00
2	Pendapatan yang ditangguhkan	3.2.18	67.001,00	9.675.195,00
3	Cadangan Piutang	3.2.18	54.006.797.559,49	364.140.781.119,40
4	Cadangan Persediaan	3.2.18	9.957.775.980,89	15.281.768.743,00
5	Dana yg Harus Disediakan utk Pemby. Utang Jk. Pendek	3.2.18	(5.685.839.766,00)	(252.669.962,00)
	Jumlah Ekuitas Dana Lancar		225.338.806.256,38	673.425.465.049,40
III	EKUITAS DANA			
2	INVESTASI			
1	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	3.2.19	283.299.496.021,02	327.182.389.693,15
2	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	3.2.19	3.853.225.866.150,00	4.293.251.424.738,00
3	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	3219	845.12.795.380,00	143.860.000.000,00
4	Dana yg Harus Disediakan utk Pemby. Utang Jk. Panjang	3.2.19	(35.851.828.078,00)	(64.212.950.948,00)
	Jumlah Ekuitas Dana Investasi		4.185.186.329.473,02	4.700.081.254.331,15
III.	EKUITAS DANA			
3	CADANGAN	3.2.20		
1	Diinvestasikan dalam Dana Cadangan	3220	25.000.000.000,00	-
	Jumlah Ekuitas Dana Cadangan	3.2.20	25.000.000.000,00	-
	<b>JUMLAH EKUITAS DANA</b>		<b>44.435.525.135.729,40</b>	<b>53.373.506.719.380,55</b>
	<b>JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA</b>		<b>4.477.140.436.474,40</b>	<b>5.438.033.205.130,55</b>

Sumber: Dokumen Realisasi anggaran

### III.2. KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEUANGAN MASA LALU

Kebijakan pengelolaan pada masa sebelumnya dapat dijadikan evaluasi dalam perencanaan pembangunan lima tahun ke depan. Realisasi atas capaian target pendapatan dan penerimaan daerah menggambarkan peta kemampuan daerah untuk memperoleh pendanaan APBD. Kebijakan pengelolaan keuangan dicerminkan dari proporsi penggunaan anggaran untuk pemenuhan kebutuhan aparatur terhadap total belanja keseluruhan dan proporsi Pendapatan Daerah terhadap Belanja Daerah.

### III.2.1. PROPORSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumber daya, sementara kebijakan keuangan daerah diarahkan kepada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

Secara umum belanja daerah dapat dikategorikan ke dalam belanja aparatur dan belanja publik. Belanja publik merupakan belanja yang penggunaannya diarahkan dan dinikmati langsung oleh masyarakat.

Dalam empat tahun terakhir (2011-2014) proporsi Belanja Pegawai berada dalam rentang 48,27 persen hingga 55,30 persen terhadap total pengeluaran (belanja ditambah dengan pembiayaan pengeluaran). Tren proporsi Belanja Pegawai terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dengan rata-rata pertumbuhan 12,04 persen per tahun. Hal ini terjadi karena terjadinya kenaikan Gaji PNS sebesar sepuluh persen serta pemberian gaji ke-13.

Dari Tabel III.8 menunjukkan bahwa APBD Kota Bogor relatif baik dari sisi belanja, karena proporsi penggunaan anggaran untuk belanja aparatur tidak mendominasi terhadap total pengeluaran dalam APBD.

Tabel III.8 Proporsi Penggunaan Anggaran 2011-2014

TAHUN	TOTAL BELANJA PEGAWAI(BELANJA LANGSUNG + BELANJA TIDAK LANGSUNG)(RP)	TOTAL PENGELUARAN (BELANJA+ PEMBIAYAAN PENGELUARAN) (RP)	PERSENTASE BELANJA PEGAWAI
2011	609.126.355.841	1.101.454.216.295	55,30
2012	721.136.940.040	1.328.886.891.990	54,27
2013	754.650.690.499	1.478.064.699.166	51,06
2014	856.776.106.502	1.774.821.638.407	48,27

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

### III.2.2. ANALISIS PEMBIAYAAN

Pembiayaan adalah transaksi keuangan daerah yang dimaksudkan untuk menutup selisih antara pendapatan daerah dan belanja daerah, ketika terjadi defisit anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Sedangkan pengeluaran dalam pembiayaan itu sendiri adalah anggaran hutang, bantuan modal dan transfer ke dana cadangan.

Analisis pembiayaan dimaksudkan untuk mengetahui perkembangan defisit riil yang dihitung berdasarkan data realisasi pendapatan, realisasi belanja serta realisasi pengeluaran pembiayaan pada masa sebelum tahun perencanaan. Selanjutnya analisis pembiayaan juga dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan sumber-sumber penutup defisit riil tersebut berdasarkan komposisinya.

Tabel III.9 Jenis dan Jumlah Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2013

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
1	Jumlah Pendapatan Daerah	1.141.637.967.971	1.356.530.080.355	1.574.372.008.958	1.604.980.700.547
		Dikurangi			
2	Total Belanja	1.074.576.515.295	1.256.206.808.990	1.422.132.371.106	1.738.393.797.107
3	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.877.701.000	72.680.083.000	55.932.328.060	36.427.841.300

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
	Surplus Riil (+) / Defisit Riil (-)	40.183.751.676	27.643.188.365	96.307.309.792	-169.840.937.860
	Ditambahkan				
4	Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah	97.655.357.440	139.415.917.116	197.938.800.162	307.172.157.954
	<b>SiLPA</b>	<b>137.839.109.116</b>	<b>167.059.105.481</b>	<b>294.246.109.954</b>	<b>137.331.220.094</b>

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2013

Tabel III.9 menunjukkan bahwa pada tahun 2011 realisasi belanja daerah masih lebih kecil daripada realisasi pendapatan. Hal ini berarti tidak terjadi defisit anggaran atau surplus sebesar Rp 40.183.751.676. sehingga tidak diperlukan anggaran penutup riil. Oleh karena itu SiLPA tahun sebelumnya tidak dialokasikan untuk menutup defisit melainkan dialokasikan sepenuhnya sebagai penerimaan pembiayaan pada tahun berkenaan dan akan menambah SiLPA tahun berkenaan yang selanjutnya akan menjadi bagian sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) pada tahun berikutnya. Surplus riil anggaran pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 31,21 persen menjadi Rp 27.643.188.365. Surplus riil kemudian meningkat kembali pada tahun 2013 menjadi Rp 96.307.309.792.

Pertambahan nilai surplus riil pada tahun 2013 ini menyebabkan SiLPA mengalami peningkatan yang signifikan sebesar 76,13 persen menjadi Rp 294.246.109.954 dari awalnya Rp 167.059.105.481 pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 diperkirakan akan terjadi defisit riil hingga minus Rp 169.840.937.860. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya perkiraan anggaran belanja Pemerintah Kota Bogor, namun defisit riil ini mampu ditutupi dengan penerimaan pembiayaan daerah sebesar Rp 307.172.157.954 sehingga SiLPA tahun berkenaan pada tahun 2014 ditargetkan mencapai Rp 137.331.220.094.

### III.2.2.1. PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari Sisa Lebih Perhitungan (SiLPA) yang terdiri atas pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya.

Tahun 2011 realisasi penerimaan pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 97.655.357.440 kemudian meningkat 42,76 persen menjadi Rp 139.415.917.116 pada 2012. Realisasi ini terus mengalami peningkatan 41,98 persen pada tahun 2013 menjadi Rp 197.938.800.162. Sedangkan pada tahun 2014 diperkirakan penerimaan pembiayaan daerah mengalami peningkatan signifikan hingga 55,69 persen menjadi Rp 307.172.157.954.

### III.2.2.2. PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pengeluaran pembiayaan daerah dilaksanakan dalam bentuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah pada BUMD dan pemberian pinjaman daerah. Tahun 2011 realisasi pengeluaran pembiayaan daerah adalah sebesar Rp 26.877.701.000 kemudian meningkat berturut-turut menjadi Rp 72.680.083.000 pada tahun 2012 dan Rp 56.932.328.060 pada tahun 2013.

Tabel III.10 Jenis Pembiayaan Daerah Kota Bogor Tahun 2011-2014

NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014
<b>A</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>				
1	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Sebelumnya	97.655.357.440	137.839.305.116	167.060.005.481	294.236.109.954
2	Pencarian Dana Cadangan	0		30.407.146.681	
3	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	12.000.000.000
4	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman		0	471.648.000	936.048.000
5	Penerimaan Piutang Daerah		1.576.612.000		
6	Pelampauan Penerimaan Dan Penghematan Belanja		0		
	<b>Jumlah Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>97.655.357.440</b>	<b>139.415.917.116</b>	<b>197.938.800.162</b>	<b>307.172.157.954</b>
<b>B</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>				
1	Pembentukan Dana Cadangan		25.000.000.000	5.000.000.000	
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	26.377.701.000	47.208.435.000	44.310.640.294	23.874.731.300
3	Pembayaran Pokok Utang	0	0	5.685.639.766	53.110.000
4	Pemberian Pinjaman Daerah	500.000.000	471.648.000	936.048.000	12.500.000.000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Daerah	26.877.701.000	72.680.083.000	55.932.328.060	36.427.841.300
	<b>TOTAL PEMBIAYAAN</b>	<b>70.777.656.440</b>	<b>66.735.834.116</b>	<b>142.006.472.102</b>	<b>270.744.316.654</b>

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014

### III.3. KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan disusun untuk memperoleh gambaran kekuatan keuangan Kota Bogor dalam pembangunan daerah, baik yang menyangkut Urusan Wajib maupun Urusan Pilihan. Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama lima tahun ke depan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

#### III.3.1. ANALISIS BELANJA DAN PENGELUARAN PERIODIK WAJIB DAN MENGIKAT SERTA PRIORITAS UTAMA

Analisis Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib Serta Prioritas Utama berfungsi untuk mengetahui rata-rata pertumbuhan pengeluaran belanja maupun pembiayaan yang bersifat wajib serta prioritas. Dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, maka disajikan data dan perhitungan rata-rata pertumbuhan sebagaimana Tabel III.11 dibawah ini:

Tabel III.11 Belanja dan Pengeluaran Periodik. Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama

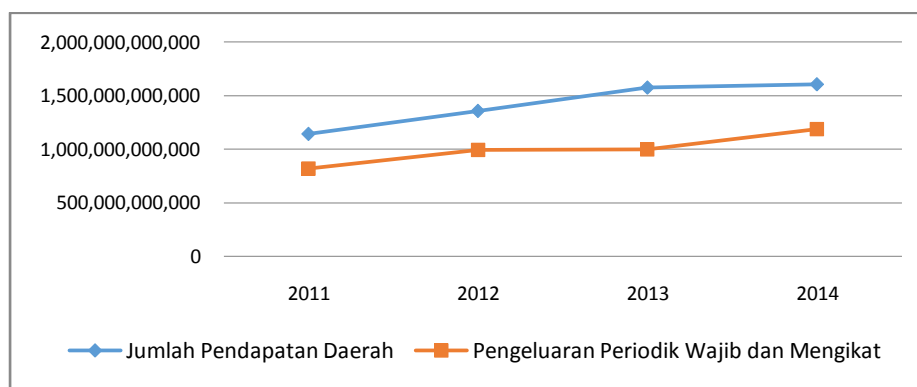
NO	URAIAN	2011	2012	2013	2014	RATA-RATA PERTUMBUHAN
5.1	BELANJA TIDAK LANGSUNG					
5.1.1	Belanja Pegawai ( Bel.	541.591.289	629.017.584.0	662.464.92	746.344.698	11,28 %
		.786	82	5.154	.204	
5.1.1.1.	Gaji dan	478.518.432	564.896.658.1	586.089.73	638.213.276	10,08
5.1.1.1.	Tambahan Penghasilan	47.411.464.174	46.079.066.00	57.479.469.212	85.185.978.000	21,57 %
5.1.1.1.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DP	2.848.800.00	2.938.800.000	4.278.120.00	4.395.120.00	15,55 %
5.1.1.1.	Insentif Pajak dan Retribusi	12.812.593.337	13.542.549.126	14.617.597.232		6,81%
5.1.1.1.	Insentif Pemungutan				15.582.250.000	0
5.1.1.1.	Insentif Pemungutan		1.560.510.845		2.968.073.296	0
5.1.2	Belanja Bunga	0	788.319.621	993.071.15	5.700.000.0	168,90
5.1.2.2.	Bunga Utang	0	788.319.621	993.071.15	5.700.000.0	
5.1.3	Belanja Subsidi	0	0	0	0	0
5.1.4	Belanja Hibah	0	2.377.266.000	47.766.235.	8.670.925.0	53,93
5.1.4.4.	Belanja Hibah	0	2.377.266.000	25.704.958.	8.670.925.0	
	Belanja Hibah Pemilu Kepala Daerah dan	0	0	22.061.276.246		0
5.1.5	Belanja	935.730.341	3.899.753.000	300.000.00	14.592.250.	149,84
5.1.5.02	Belanja Bantuan Partai	935.730.341	3.899.753.000	300.000.00	14.592.250.000	
5.1.8	Belanja Tidak	1.775.308.5	4.598.665.450	3.592.797.1	13.773.686.	97,97
5.1.8.8.	Belanja Tidak	1.775.308.5	4.598.665.450	3.592.797.1	13.773.686.	
	Sub Total A	544.302.328	640.681.588.1	715.117.02	789.081.559	13,18
5.2	BELANJA LANGSUNG					
5.2.1	Belanja Pegawai ( Bel. Langsung )	67.535.066.055	85.956.561.958	39.160.908.425	110.122.908.298	17,70 %
5.2.1.1.	Honorarium	35.324.271.	55.601.938.85	27.836.413.	54.747.574.	15,73
5.2.1.1.	Honorarium	20.619.149.	24.556.793.54	1.475.480.7	41.482.608.	26,24
5.2.1.1.	Uang Lembur	1.686.878.5	1.448.853.000	2.394.000.0	1.759.707.5	1,42%
5.2.1.1.	Honorarium Pengelolaan		2.489.101.199	6.998.513.775	2.394.009.980	-1,93%
5.2.1.1.	Belanja kursus. pelatihan. sosialisasi dan		22.800.000	415.000.000	27.750.000	10,32 %
5.2.1.1.	Belanja	9.904.766.2	1.837.075.359	41.500.000	9.711.258.5	-0,66%
5.2.2	Belanja Barang	181.826.723	195.840.786.1	190.877.82	263.082.817	13,10
5.2.2.01	Belanja Bahan Pakai Habis	5.864.337.208	7.229.414.714	65.892.515.915	7.955.051.523	10,70 %
5.2.2.02.	Belanja	19.324.118.	21.377.668.43	1.530.719.8	33.798.919.	20,49
5.2.2.02.	Belanja Jasa	44.923.736.	62.019.935.70	23.567.362.	64.539.457.	12,84
5.2.2.02.	Belanja Premi	997.631.727	1.328.032.550	10.254.303.	1.991.540.0	25,91
5.2.2.02.	Belanja Perawatan	21.567.905.930	16.469.106.906	2.205.168.000	29.036.341.307	10,42 %
5.2.2.02.	Belanja Cetak dan	7.674.978.993	9.177.907.311	329.620.000	10.492.222.470	10,98 %
5.2.2.02.	Belanja Makanan dan	17.083.068.055	21.860.939.918	2.296.521.320	27.695.263.000	17,48 %
5.2.2.02.	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	2.581.314.563	1.748.515.716	660.366.750	3.082.836.000	6,10%
5.2.2.02.	Belanja	611.576.245	875.424.500	31.899.871.	1.354.110.0	30,34

5.2.2.	Belanja	16.488.088.	20.216.149.57	8.500.179.6	46.835.910.	41,62
5.2.2.16	Belanja Beasiswa	32.250.000	131.900.000	27.648.067.027	176.000.000	76,06 %
5.2.2.17	Belanja Kursus. Pelatihan.	6.887.569.125	10.383.183.207	9.099.851.977	5.316.354.000	-8,27%
5.2.2.	Belanja	8.075.849.4	12.956.061.26	58.628.250	21.710.553.	39,05
5.2.2.24	Belanja Barang dan Jasa – BOS	29.714.298.750	10.066.546.394	6.934.645.885	72.109.463	- 86,56
5.2.2.27	Belanja Barang dan Jasa BOS				9.026.147.832	0
5.2.3	Belanja Modal	0	0	0	0	
	Sub Total B	249.361.789	281.797.348.1	230.038.73	373.205.725	14,39
6.2	Pengeluaran Pembiayaan					
6.2.1	Pembentukan Dana		25.000.000.000	5.000.000.000		- 100,00
6.2.2	Penyertaan Modal (Investasi)	26.377.701.000	47.208.435.000	44.310.640.294	23.874.731.300	-3,27%
6.2.3	Pembayaran	0	0	5.685.639.7		0
	Sub Total C	26.377.701.	72.208.435.000	54.996.280.	23.874.731.	-3,27%
	TOTAL A+B+C	820.041.819.403	994.687.371.298	1.000.152.039.180	1.186.162.016.242	13,09 %

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2011-2014 (Update data Mei 2014)

Dari perhitungan tabel diatas diketahui bahwa sepanjang empat tahun terakhir (2011-2014), Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama rata-rata pertumbuhannya adalah sebesar 13,09 persen per tahun. Apabila dihitung berdasarkan masing-masing jenis pengeluaran maka Belanja Bunga memiliki rata-rata pertumbuhan yang sangat signifikan yaitu 168,90 persen per tahun.

Kebijakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2015 – 2019 memberi penekanan pada **efisiensi dan realokasi anggaran**. Efisiensi anggaran ialah penghematan anggaran pada pos-pos yang anggarannya masih memungkinkan untuk dikurangi tanpa mengorbankan *output* atau *outcomes* dan dana hasil efisiensi itu kemudian di **realokasikan** untuk pos-pos lain yang dibutuhkan bagi peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk implementasi dari efisiensi dan realokasi anggaran tersebut adalah ditekannya angka pertumbuhan Belanja Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama dari awalnya 13,09 persen per tahun menjadi 11,00 persen per tahun. Angka ini kemudian menjadi patokan dalam memproyeksikan Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama selama lima tahun ke depan.



Gambar III.6 Perbandingan antara Pendapatan Daerah dengan Belanja dan Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2011-2014

Pada tahun 2011, proporsi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terhadap Pendapatan Daerah adalah sebesar 71,83 persen, kemudian terus mengalami peningkatan menjadi 73,32 persen pada tahun 2012. Pada tahun 2013 proporsi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama mengalami penurunan menjadi 63,52 persen kemudian meningkat pada tahun 2014 menjadi 73,90 persen. Penurunan proporsi Belanja dan Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terhadap Pendapatan Daerah sebenarnya dapat menunjukkan meningkatnya penggunaan anggaran bagi kepentingan masyarakat secara langsung.

### III.3.2. PROYEKSI DATA MASA LALU

Dalam bagian ini menjelaskan mengenai proyeksi data masa lalu dan asumsi yang digunakan untuk memproyeksi serta kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proyeksi data. Penyusunan proyeksi ini didasarkan pada rata-rata pertumbuhan realisasi lima tahun yang meliputi proyeksi Pendapatan Daerah dan proyeksi Belanja dan Pengeluaran Periodik, Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama.

Tabel III.12 Proyeksi Pendapatan Daerah dan Belanja Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Tahun 2015-2019

URAIAN	TAHUN DASAR (RP)	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)	PROYEKSI (RP)				
			2015	2016	2017	2018	2019
Pendapatan Daerah Kota Bogor	1.604.980.700.547	12,28	1.801.997.888.924	2.023.199.625.053	2.271.554.727.745	2.550.396.289.861	2.863.466.662.673
Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama	1.186.162.016.242	11,00	1.316.639.838.029	1.461.470.220.212	1.622.231.944.435	1.800.677.458.323	1.998.751.978.738
Persentase Belanja dan Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama terhadap Pendapatan Daerah	73,91		73,07	72,24	71,42	70,60	69,80

Sumber: Diolah dari APBD Kota Bogor Tahun 2014

Pada Tabel III.12 diatas, hasil proyeksi hingga tahun 2019 menunjukkan bahwa pendapatan daerah yang teralokasikan untuk Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat serta Prioritas utamadiprojeksikan akan terus menurun hingga tahun 2019. Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan keuangan daerah lebih menitikberatkan pada pos-pos belanja yang manfaatnya dapat diterima secara langsung oleh masyarakat.



### III.3.3. PENGHITUNGAN KERANGKA PENDANAAN

Kerangka pendanaan ini bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program jangka menengah lima tahun kedepan. Kapasitas riil inilah yang akan digunakan sebagai sumber pembiayaan bagi program-program prioritas maupun belanja tidak langsung.

Berdasarkan proyeksi Penerimaan Daerah dan Belanja serta Pengeluaran Pembiayaan Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama lima tahun kedepan (2015-2019) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor sebagaimana dapat dilihat pada Tabel III.13.

Tabel III.13 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019

NO	URAIAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	Pendapatan	1.801.997.888.924	2.023.199.650.053	2.271.554.727.745	2.550.396.289.861	2.863.466.662.673
2	Pencairan Dana Cadangan (Sesuai Perda)	0	0	0	0	0
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000
<b>Total Penerimaan</b>		<b>1.851.997.888.924</b>	<b>2.073.199.650.053</b>	<b>2.321.554.727.745</b>	<b>2.600.396.289.861</b>	<b>2.913.466.662.673</b>
Dikurangi:						
4	Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan yang wajib dan mengikat serta Prioritas Utama	1.316.639.838.029	1.461.470.220.212	1.622.231.944.435	1.800.677.458.323	1.998.751.978.738
<b>Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan</b>		<b>535.358.050.896</b>	<b>611.729.429.841</b>	<b>699.322.783.310</b>	<b>799.718.831.538</b>	<b>914.714.683.935</b>
<b>% Kapasitas Riil terhadap Pendapatan Daerah (%)</b>		<b>29,71</b>	<b>30,24</b>	<b>30,79</b>	<b>31,36</b>	<b>31,94</b>
<b>Rencana alokasi Prioritas I</b>						
5	Belanja Langsung	428.286.440.717	489.383.543.873	559.458.226.648	639.775.065.230	731.771.747.148
6	Pembentukan Dana Cadangan					
<b>Rencana Alokasi Prioritas II</b>						
7	Belanja Langsung	80.303.707.634	91.759.414.476	104.898.417.497	119.957.824.731	137.207.202.590
8	Belanja Tidak Langsung	26.767.902.545	30.586.471.492	34.966.139.166	39.985.941.577	45.735.734.197
<b>Surplus Anggaran Riil dan Berimbang</b>		<b>Berimbang</b>	<b>Berimbang</b>	<b>Berimbang</b>	<b>Berimbang</b>	<b>Berimbang</b>

Pada Tabel III.13 tersebut diatas dapat dilihat bahwa prioritas pengeluaran yang harus didahulukan adalah bersifat wajib mengikat dan prioritas utama baik pada belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan maupun yang berada pada belanja tidak langsung. Penghitungan kerangka pendanaan menunjukkan bahwa kapasitas riil keuangan daerah berkisar antara 29,71 persen – 31,94 persen terhadap total penerimaan daerah yang ada.

Kapasitas riil keuangan daerah tersebut merefleksikan besaran pos Belanja Langsung dari APBD Kota Bogor. Dapat diamati bahwa besaran pos Belanja Langsung ini diproyeksikan senantiasa meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini mencerminkan kebijakan Walikota dan Wakil Walikota terpilih periode 2015 – 2019 yang memberi penekanan pada efisiensi dan realokasi anggaran.